

2025

**LKPJ DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN**



**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

lenovo

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, atas izin dan maunah-NYA, sehingga laporan ini dapat diselesaikan walaupun dengan sedikit keterlambatan. Namun kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Banyak kendala yang dihadapi terkait penyusunan laporan ini terutama ketersediaan data dan banyaknya laporan lain yang bersamaan harus diselesaikan dalam waktu dekat.

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak perubahan terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam sebagai sumber PAD dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi membuat kecepatan pemanfaatan data juga berubah, sehingga wisatawan yang seharusnya dan biasanya mengunjungi tourism informasi untuk meminta data terkait objek wisata, kini melalui gadget sudah mampu mencari sendiri apa yang diinginkan. Dan ini mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk menarik minat wisatawan dari setiap destinasi yang ada di daerah lain bahkan di negara lain.

Selain itu, perubahan paradigma dari trend wisata massal menjadi wisata minat khusus perlu menjadi perhatian pemerintah. Dimana sekarang kegiatan wisata lebih mengedepankan keberlangsungan lingkungan yang dapat mencegah kerusakan dan kepunahan tumbuhan dan hewan yang ada didalamnya serta lingkungan yang penuh dengan sampah dan limbah akibat aktivitas wisata.

Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan waktu memberi data dan informasi serta menyelesaikan laporan ini sehingga laporan ini hadir di hadapan pembaca.

Benteng, 9 Maret 2026

**KADIS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**



**NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.**

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan..... 1

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan ..... 2

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan,  
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural ..... 5

**BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ..... 8**

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... 8

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan  
Program , Kegiatan dan subkegiatan ..... 8

2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator  
Kinerja Utama..... 14

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan ..... 15

2.1.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan  
Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan  
dalam Perjanjian Kinerja ..... 16

2.1.5 Inovasi ..... 17

2.1.6 Prestasi / Penghargaan ..... 17

2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati)  
yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan  
oleh Kepala Daerah. .... 18

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati  
Tahun Anggaran 2024 ..... 18

**BAB III PENUTUP ..... 19**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 4 Benteng dengan titik koordinat lokasi berada diantara 6° 07' 06.3" LS / 120° 27'31.2" BT, kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu situs dan bangunan cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 603 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Gedung Dinas Kepariwisata sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

Sebagai unsur pelaksana urusan pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk kedalam kantor tipe A yang terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, SDM dan Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan.

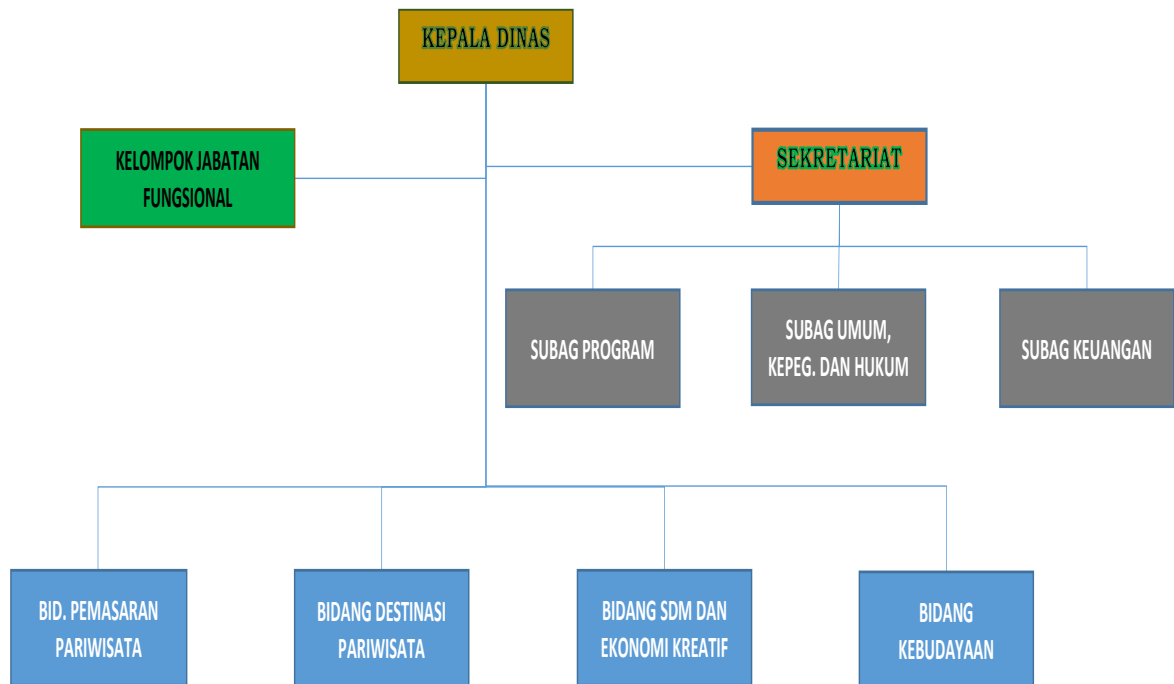
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memaksimalkan perannya dalam merumuskan kebijakan teknis yang mendukung pengembangan potensi pariwisata dengan mewujudkan destinasi lokal yang berkualitas dan mengembangkan kompetensi SDM pariwisata, serta menghadirkan kebijakan yang mendukung pemajuan kebudayaan daerah. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diakses melalui *URL website* resmi <https://pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id> dan untuk kontak akun *e-mail* pada [disparselayar@gmail.com](mailto:disparselayar@gmail.com)

## **1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti di daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuklah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengatur 2 (dua) urusan yaitu Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terakhir di ubah menjadi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kebudayaan. Setiap bidang tersebut membawahi 3 (tiga) seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada gambar di bawah ini :

**Gambar.1. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- i. menyelenggarakan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pariwisata dan kebudayaan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari ASN (PNS) sebanyak 34 orang dan tenaga PTT dan Sukarela 33 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### 1. Klasifikasi menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan**

<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IV	3 orang
Jabatan Fungsional	25 orang
Staf (PHL)	33 orang
Staf (Sukarela)	0 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>67 orang</b>

#### 2. Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.2**

**Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
	<b>PNS</b>	<b>PHL/SUKARELA</b>
Sarjana S2	6 orang	1 orang
Sarjana S1	15 orang	12 orang
Sarjana Muda (D2/D3)	6 orang	10 orang
SMA	7 orang	10 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>34 Orang</b>	<b>33 Orang</b>

3. Klasifikasi menurut Pangkat dan Golongan Ruang

Berdasarkan Pangkat dan Golongan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.4**

**Klasifikasi Pegawai menurut Pangkat**

<b>PANGKAT</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Pengatur</b>	
Pengatur Muda	0 orang
Pengatur Muda Tk. I	0 orang
Pengatur	1 orang
Pengatur Tk. I	4 orang
<b>Penata</b>	
Penata Muda	7 orang
Penata Muda Tk. I	2 orang
Penata	5 orang
Penata Tingkat 1	10 orang

<b>PANGKAT</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Pembina</b>	
Pembina	4 orang
Pembina Tingkat I	1 orang
Pembina Utama Muda	0 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>34 orang</b>

**Tabel 1.5**

**Klasifikasi Pegawai menurut Golongan**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Golongan IV	5 orang
Golongan III	24 orang
Golongan II	5 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>32 orang</b>

## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

##### 2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata. Urusan Kebudayaan di wakili oleh 1 (satu) bidang yaitu Bidang Kebudayaan, Sementara Urusan Pariwisata diwakili oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif.

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp. 6.560.469.500,- terdiri dari 7 (tujuh) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Dari Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.353.850.870,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, sisa anggaran sebesar Rp.206.618.630,-

**Tabel 2.1.1.**

#### Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program Kegiatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
I.	KEBUDAYAAN	DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<b>PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Rp 117,498,300.00	Rp 110,773,129.00	94.28			
			i. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab. / Kota	Rp 117,498,300.00	Rp 110,773,129.00	94.28			
			1. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Rp 117,498,300.00	Rp 110,773,129.00	94.28			
			Aktivitasnya adalah melakukan pendaftaran WBTB Siniik bulaengna parangia dan A'rera/ Fasilitas event budaya (batti-batti)/ pemutakhiran PPKD		0 WBTB terdaftar		data pendukung/ referensi WBTB oleh pusat dianggap kurang	mempersiapkan data pendukung/ referensi untuk tahun depan	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			<b>PEMBINAAN SEJARAH</b>	Rp 65,000,000.00	Rp 64,960,000.00	99.94			
			<b>I. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) daerah kabupaten/ kota</b>	Rp 65,000,000.00	Rp 64,960,000.00	99.94			
			1. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Rp 65,000,000.00	Rp 64,960,000.00	99.94			
			Aktivitasnya ekspedisi jejak sejarah masa lalu (ekspedisi gua-gua di Kepulauan Selayar)		1 Paket				
			<b>PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Rp 812,195,800.00	Rp 812,058,849.00	99.98			
			<b>I. Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota</b>	Rp 812,195,800.00	Rp 812,058,849.00	99.98			
			1. Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Rp 708,595,000.00	Rp 708,595,000.00	100.00			
			Aktivitasnya operasionalisasi kegiatan museum Tana Doang (DANA DAK NON FISIK, DAU)		1 museum				
			2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp 103,600,800.00	Rp 103,463,849.00	99.87			
			Rehabilitasi Museum		1 museum				
II.	<b>PARIWISATA</b>		<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Rp 4,587,337,100.00	Rp 4,399,804,555.00	95.91			
			<b>I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 3,514,313,000.00	Rp 3,395,155,049.00	96.61			
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,495,008,200.00	Rp 3,379,096,994.00	96.68			
			Aktivitasnya pembayaran gaji ASN dan TPP		34 ASN				
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6,710,800.00	Rp 5,811,660.00	86.60			
			Aktivitasnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023		1 laporan				
			3. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Rp 6,264,700.00	Rp 5,182,225.00	82.72			
			Aktivitasnya penyiapan bahan tanggapan untuk pemeriksaan BPK dan inspektorat						
			4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Rp 6,329,300.00	Rp 5,064,170.00	80.01			
			Penyusunan laporan RFK 2025						

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBUJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			<b>II. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 392,137,600.00	Rp 372,055,041.00	94.88			
			1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 5,356,000.00	Rp 5,175,810.00	96.64			
			Pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan		1 Paket				
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 8,574,500.00	Rp 8,568,149.00	99.93			
			Pengadaan kursi nongkrong di CFD/ CFN		1 set				
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 83,445,800.00	Rp 77,281,912.00				
			Aktivitasnya Pengadaan ATK kantor		1 laporan				
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 45,291,300.00	Rp 35,621,467.00	78.65			
			Aktivitasnya pengadaan spanduk/ fotocopy/Map logo dinas		1 laporan				
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10,080,000.00	Rp 7,800,000.00	77.38			
			Aktivitasnya langganan koran dan pengadaan ucapan selamat/ karangan bunga		1 laporan				
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 17,688,000.00	Rp 15,964,000.00				
			Aktivitasnya Fasilitas makan minum tamu		1 laporan				
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 221,702,000.00	Rp 221,643,703.00	99.97			
			Aktivitasnya perjalanan dinas mengikuti rapat2 dan konsultasi di dalam dan luar daerah		1 laporan				
			<b>III. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Rp 144,305,000.00	Rp 134,381,247.00	93.12			
			1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 126,085,000.00	Rp 116,418,121.00	92.33			
			Aktivitasnya : Pengadaan kamera 1 unit, laptop 2 unit, komputer PC 1 unit, Printer 1 unit		5 unit				
			2. Penyediaan	Rp 18,220,000.00	Rp 17,963,126.00	98.59			
			Aktivitasnya : Pengadaan bangunan gudang		1 unit				
			<b>IV. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Rp 294,492,900.00	Rp 262,024,684.00	88.97			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 62,647,300.00	Rp 51,252,284.00	81.81			
			Aktivitasnya pembayaran internet indihome, air, dan listrik kantor		1 laporan				
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 231,845,600.00	Rp 210,772,400.00	90.91			
			Aktivitasnya pembayaran honor PTT, jasa kebersihan, sopir, asuransi PTT, pembayaran PBB kantor, dan penyediaan makanan dan minum rapat		1 laporan				

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			<b>V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 242,088,600.00	Rp 236,188,534.00	97.56			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 44,630,000.00	Rp 43,629,355.00	97.76			
			Aktivitasnya penyediaan jasa pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan mobil dinas jabatan		1 laporan				
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 148,163,600.00	Rp 144,933,679.00	97.82			
			Aktivitasnya Penyediaan jasa pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan mobil dinas operasional/lapangan		1 Laporan				
			3 Pemeliharaan mebel	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	100.00			
			Pemeliharaan kursi sofa tamu		1 set				
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 26,595,000.00	Rp 24,930,000.00	93.74			
			Aktivitasnya pemeliharaan AC, dan laptop/printer		1 laporan				
			4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 15,200,000.00	Rp 15,195,500.00	99.97			
			Aktivitasnya pengecatan bangunan kantor dan perbaikan bangunan kantor		1 laporan				
			<b>PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA</b>	Rp 521,059,500.00	Rp 516,965,197.00	99.21			
			<b>I. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Rp 138,280,000.00	Rp 135,326,000.00	97.86			
			1. Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota	Rp 90,000,000.00	Rp 87,905,000.00	97.67			
			Monev pengelolaan daya tarik wisata		1 kegiatan				
			2 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Rp 48,280,000.00	Rp 47,421,000.00	98.22			
			Aktivitasnya pelaksanaan meeting terkait perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan		1 paket				

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBUJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			<b>II. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota</b>	Rp 50,000,000.00	Rp 49,800,000.00	99.60			
			1. Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	Rp 50,000,000.00	Rp 49,800,000.00	99.60			
			Pembuatan DED fasilitas pendukung pariwisata desa khusus Bahuluang		1 kegiatan				
			<b>III. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Rp 315,517,500.00	Rp 314,647,197.00	99.72			
			1. Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	Rp 62,020,000.00	Rp 61,931,700.00	99.86			
			Partisipasi Forum Perencanaan Destinasi Wisata		1 kegiatan				
			2. Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Rp 242,247,500.00	Rp 241,465,497.00	99.68			
			Aktivitasnya : pembayaran retensi pemasangan menara sirine dan instalasi alat mitigasi bencana pantai Tamamelong, Pengadaan alat selam 1 unit, pembangunan bangunan fasilitas umum		2 unit				
			3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	Rp 11,250,000.00	Rp 11,250,000.00	100.00			
			Aktivitasnya : pendampingan dalam rangka pengembangan desa wisata		1 kegiatan				
			<b>IV. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/ kota</b>	Rp 17,262,000.00	Rp 17,192,000.00	99.59			
			1. Kesiapan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/ kota	Rp 4,650,000.00	Rp 4,650,000.00	100.00			
			Aktivitasnya : Rapat dan perjalanan dinas dalam daerah		1 kegiatan				
			2. Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/ kota	Rp 12,612,000.00	Rp 12,542,000.00	99.44			
			Aktivitasnya : Fasilitas pelaksanaan IPRO dan KEK Pariwisata Selayar		1 kegiatan				

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			PEMASARAN PARIWISATA	Rp 415,967,800.00	Rp 409,188,140.00	98.37			
			I. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategi Pariwisata Kab/Kota	Rp 415,967,800.00	Rp 409,188,140.00	98.37			
			1. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota, baik dalam dan luar negeri	Rp 21,256,500.00	Rp 21,169,700.00	99.59			
			aktivitasnya : penyediaan data kunjungan wisatawan , pengelolaan TIC bandara dan pengelolaan website pariwisata		1 laporan				
			2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 172,955,500.00	Rp 166,923,100.00	96.51			
			Aktivitasnya Pembuatan Bahan cetak promosi, pembuatan TVC promosi pariwisata		1 laporan				
			3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Rp 221,755,800.00	Rp 221,095,340.00	99.70			
			Aktivitasnya menghadiri malam puncak API award 2025 di Bengkulu, koordinasi ke MKS, partisipasi event pariwisata di provinsi Sul-Sel, Famtrip/ wonderful Selayar, Festival A'lampareng		1 laporan				
			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 41,411,000.00	Rp 40,101,000.00	96.84			
			I. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 41,411,000.00	Rp 40,101,000.00	96.84			
			1. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Rp 4,736,000.00	Rp 3,726,000.00	78.67			
			Aktivitasnya : perjalanan dinas ke MKS		1 laporan				
			2. Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp 36,675,000.00	Rp 36,375,000.00	99.18			
			Pendataan pelaku usaha ekonomi kreatif dan pendampingan pokdarwis		1 laporan				
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>				<b>Rp 6,560,469,500.00</b>	<b>Rp 6,353,850,870.00</b>	<b>96.85</b>			

### 2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2025 yang menjadi target sesuai Renstra Disparbud 2021 – 2026 adalah Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (domestik/ asing) sebesar (10%) Wisnus dari tahun sebelumnya dan (5%) Wisman dari tahun sebelumnya , Persentase kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor pariwisata dengan target 1,5%, Penetapan nilai budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan tingkat nasional 2 nilai budaya, dan Kenaikan jumlah kunjungan museum 2025 sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Realisasi dari IKU di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel.2.1.2.**

**Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama**

No.	URUSAN PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	<b>Urusan Kebudayaan</b> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
	1. Penetapan Nilai Budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan tingkat provinsi	Nilai budaya/ Kearifan lokal	2	0	0	
	2. Kenaikan Kunjungan Museum	orang	10	23,38	2338	$=((6622-5367)/5367)*100$
2.	<b>Urusan Pariwisata</b> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	%	5	61,16	1223,20	Realisasi = $((635-394)/394)*100$
	2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	%	10	14,59	145.9	Realisasi = $((16159-14101)/14101)*100$
	3. Persentase kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD Sektor Pariwisata	persen	1.5	2,06	137,33	

### 2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

**Tabel. 2.1.3.**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**

No.	URUSAN PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	<b>Urusan Kebudayaan</b> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
	1. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	buah	1	1	100	
	2. Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya	event	0	3	100	
2.	<b>Urusan Pariwisata</b> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
	1. Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	16,66	-	0.00	Tidak dianggarkan
	2. Cakupan pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	0	0	0.00	
	3. Persentase jumlah wisatawan mancanegara	%	5	61,16	1223.20	Realisasi = $((635-394)/394)*100$
	4. Persentase jumlah wisatawan nusantara	%	10	14,59	145.9	Realisasi = $((16159-14101)/14101)*100$

Dari Tabel 2.1.3 dapat dilihat bahwa ada 1 (satu) IKK yang tidak terpenuhi disebabkan 1 (satu) kegiatan tidak dianggarkan mendukung kearah pencapaiannya yaitu cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif. Sementara kegiatan Pelindungan cagar budaya yang seharusnya ada cagar budaya yang dilakukan perlindungan namun tidak ada anggaran yang tersedia. Terkait kunjungan Nusantara telah memenuhi target akibat intensifnya kegiatan promosi dari media cetak dan internet (website) dan meningkatnya kontribusi PAD karena meningkatnya pemasukan dari peminjaman alat selam.

#### **2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2025 adalah :

- a. Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat dengan indikator persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari 30%.
- b. Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor pariwisata dengan indikator persentase Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata sebesar 1,5%.

**Tabel. 2.1.4.**

#### **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

No.	Urusan pemma/ OPD	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi anggaran (%)	Jumlah Indikator kinerja program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1.	Urusan Kebudayaan Dinas pariwisata dan Kebudayaan	994,694,100	987,791,978	6,902,122	99.31	3	100.00	3	100
2.	Urusan Pariwisata Dinas pariwisata dan Kebudayaan	5,585,775,400	5,366,058,892	219,716,508	96.07	4	100	11	100
3.	Dinas pariwisata dan Kebudayaan	6,580,469,500	6,353,850,870	226,618,630	96.56	7	100.00	14	100

Untuk Urusan Kebudayaan, ditahun 2024 dilakukan pendaftaran Sinrilik Bulaengna Parangia dan A'rera di tingkat Nasional sebagai WBTB namun hingga akhir tahun masih perlu dilakukan pemenuhan kelengkapan bahan untuk dikumpulkan kembali dan di usul ulang ditahun berikutnya. Juga melakukan lomba cerita rakyat dan pau-pau to riolo. Melakukan pembayaran retensi Penataan Sarana dan Prasarana Situs Budaya gantarang Lalangbata. Selain itu, juga dilakukan pengelolaan DAK Non Fisik Museum serta biaya operasional Museum yang realisasi fisiknya 100%.

Untuk Urusan Pariwisata, di Bidang Destinasi Pariwisata, melakukan penyusunan profil desa wisata, profil investasi kawasan khusus pariwisata, pembayaran retensi rehabilitasi mangrove matalalang, pemberian bantuan hibah pokmas, partisipasi event/ forum investasi pariwisata, pembuatan bahan promosi, penyusunan dokumen data kunjungan, pelaksanaan FTB, Pemberian penghargaan dari CNN Indonesia, paritispasi event Festival Seni Pertunjukan Sulsel Menari, Pendampingan SDM ekraf di Desa Wisata, dan pelatihan pemandu wisata selam tingkat open water dan advanced.

Tahun 2025, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan hanya mendapatkan DAK Non Fisik Kebudayaan sebesar Rp. 800.000.000,-. Sementara dana DAU sebesar Rp. 2.265.461.300,- (termasuk anggaran sekretariat diluar gaji) sementara gaji sebesar Rp. 3.495.008.200,-.

#### **2.1.5. Inovasi**

Inovasi di tahun 2025 tidak ada.

#### **2.1.6. Prestasi/ Penghargaan**

Prestasi/ Penghargaan di tahun 2025 adalah penghargaan juara 1 pada ajang Anugerah Pesona Indonesia kategori ekowisata. Destinasi yang diusulkan Adalah Tinabo. 10 besar pada ajang yang sama kategori surga tersembunyi, yang diusulkan Pantai pinang.

#### **2.2. Kebijakan Daerah**

Tidak Ada kebijakan Daerah

### **2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025**

Sesuai dengan Rekomendasi dari DPRD, diharapkan untuk ditindak lanjuti agar Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan mengaktifkan Destinasi Wisata yang dikelola pemerintah daerah. Dari Rekomendasi ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait destinasi wisata puncak tana doang sudah diaktifkan kembali yang dikelola oleh BUMDES BONTOMARANNU dan pihak III (yayasan veteran art), sementara destinasi Tamamelong sudah ada pembicaraan Pemerintah daerah Kepulauan Selayar dengan UNHAS terkait rencana UNHAS akan melakukan investasi di destinasi tersebut.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persentase peningkatan kunjungan meningkat di tahun 2025 disebabkan banyak lokasi wisata, desa wisata, dan event wisata dari daerah lain berlomba mendatangkan wisatawan dengan memperkenalkan dan mengembangkan potensi wisata secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan wisatawan memiliki preferensi yang banyak untuk berwisata.

Untuk mengantisipasi hal ini, dibutuhkan untuk menggali potensi desa wisata kita dengan lebih mengedepankan keberlangsungan keanekaragaman hayati dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan butuh anggaran namun jangan sampai merusak lingkungan, sehingga dibutuhkan stakeholder lingkungan hidup untuk berkolaborasi menyusun rencana pengembangan wisata hijau.